

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat di ukur semata-mata dari prespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Hal ini juga konsisten dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah anggaran yang dibuat tidak hanya berisi angka, tetapi juga berisi target kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi sektor publik bukanlah hal mudah. Dalam proses penganggaran pemerintah perlu mengukur banyaknya anggaran yang dibelanjakan dan apa yang telah dilakukan.

Menurut Moeheriono (2014) **Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.**¹ Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur keberhasilannya.

¹Moeheriono, **Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Rajawali Pers; Jakarta, 2014, hal 95

Menurut Mahmudi (2009) **Belanja pada umumnya hanya digunakan disektor publik, tidak disektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.**² Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. Belanja tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibanding membelanjakan, karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya kebocoran, maka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan.

Berdasarkan Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja merupakan suatu pencapaian pelaksanaan atas suatu program kegiatan yang sudah di anggarkan biayanya selama satu tahun dan atas penggunaan biaya tersebut menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu periode tahun anggaran.

Pengukuran kinerja belanja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, Efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepeninganan publik, dan Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang utama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 **Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar**

²Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit Erlangga ; Jakarta, 2009, hal87

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.³

Tujuan adanya LRA (PP No.71 Tahun 2010) antara lain: (1) Menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, (2) Memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja Menurut Mahmudi(2015) yaitu:

- 1. Analisis Varians Belanja**
- 2. Analisis Pertumbuhan Belanja**
- 3. Analisis Keserasian Belanja**
- 4. Rasio Efisiensi Belanja**
- 5. Rasio Belanja Terhadap PDRB⁴**

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Penerbit: Salemba Empat, 2012, Lampiran II.01 KK

⁴ Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi ke Tiga; UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015, hal 154

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB untuk menunjukkan Produktivitas dan efektifitas belanja daerah.

Dengan menggunakan analisis belanja tersebut nantinya akan diperoleh hasil yang menunjukkan bagaimana kinerja belanja pada Dirjen PURP Irigasi dan Rawa III. Dalam melakukan analisis ini metode yang digunakan adalah menyesuaikan dengan data Laporan realisasi anggaranyang ada. Analisis yang akan digunakan yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi belanja. Dari ketiga analisis tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana selisih belanja, perkembangan belanja, serta tingkat penghematan antara realisasi dengan anggaran dari tahun ke tahun selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pertumbuhan belanja pada Dirjen PUPR Irigasi dan Rawa III dalam lima tahun terakhir. Ada pun data belanjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja pada
Dirjen PUPR Irigasi dan Rawa III
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
2014	51.212.717.000	27.373.460.000	23.839.257.000	53,45%
2015	69.091.096.000	68.524.220.400	566.875.600	99,17%
2016	147.228.402.000	127.071.121.051	20.157.280.949	86,30%
2017	123.011.244.000	120.800.512.606	2.210.731.394	98,20%
2018	58.082.412.000	56.759.618.141	1.322.793.859	97,72%

Sumber data : Ditjen PUPR Irigasi dan Rawa III

Dalam Tabel 1.1 laporan realisasi anggaran belanja tahun 2014 secara keseluruhan memperlihatkan bahwa target anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp51.212.717.000,- dan realisasinya sebesar Rp27.373.460.000,- dengan presentase terendah berada pada 53,45%.

Tahun 2015 target anggaran belanja sebesar Rp69.091.096.000,- dan realisasinya sebesar Rp68.524.220.400,- mengalami kenaikan dari tahun 2014 menjadi 99,17%. Tahun 2016 target anggaran belanja sebesar Rp147.228.402.000,- dan realisasinya Rp127.071.121.051 mengalami penurunan dari tahun 2015 menjadi 86,30%. Tahun 2017 target anggaran belanja sebesar Rp123.011.244.000,- dan realisasinya Rp120.800.512.000,- mengalami kenaikan dari tahun 2016 menjadi 98,20%. Selanjutnya tahun 2018 target anggaran belanja sebesar Rp.58.082.412.000,- dan realisasinya Rp56.759.618.141,- kembali mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 97,72%. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa baik anggaran belanja maupun realisasi anggaran belanja Ditjen PUPR Irigasi dan Rawa III setiap tahunnya cenderung fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya serta dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak ada yang melebihi anggaran belanja. Dengan ini anggaran dan realisasi belanja Dirjen PURP Irigasi dan Rawa III dapat dikatakan baik, hanya saja terdapat selisih nilai nominal antara anggaran dan realisasi yang terjadi begitu besar. Sehingga hal ini dapat dipertanyakan bagaimana kinerja belanja Dirjen PURP Irigasi dan Rawa III dan apakah realisasi dan anggaran belanja telah dialokasikan kepada pembangunan.

Analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah Dirjen PURP Irigasi dan Rawa III selaku pengguna anggaran telah menggunakan APBN secara ekonomis, efisien, dan efektif. Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengandung perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui penerimaan pajak dan pendapatan lainnya yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan peneliti terlebih dahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Daling (2013) melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini dilakukan di Dinas PPKAD yang beralamat di Lingkungan 1 Kelurahan Pasan. Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus. Meningkatkan PAD merupakan hal yang harus dilakukan untuk peningkatan pendapatan disertai penghematan belanja.

Palilingan (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja pada Dinas Pendapatan Kota Manado dapat dikatakan baik, pertumbuhan belanja cenderung fluktuatif dan mengalami pertumbuhan positif.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah memiliki kesamaan topik namun peneliti sebelumnya yang meneliti di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan seluruh metode analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja dimana didalamnya juga terdapat rasio-rasio perhitungan untuk membantu dalam penelitian dan pada Dinas Pendapatan Kota Manado menggunakan metode rasio analisis kinerja belanja. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ini adalah peneliti penulis tidak menggunakan semua

analisis belanja yang terdapat seperti peneliti terdahulu. Peneliti hanya menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi belanja.

Berdasarkan keadaan atau kondisi tersebut, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut bagaimana kinerja belanja pada Ditjen PUPR Irigasi dan Rawa III untuk tahun 2014 - 2018. Penulis ingin menganalisis kinerja belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi belanja. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Sntv Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumut (Irigasi dan Rawa III)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah suatu faktor penghambat dalam aktivitas suatu entitas yang perlu dipertanyakan atau dipecahkan serta diselesaikan. Menurut Sugiyono (2017) **Penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah.**⁵

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimana kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada kementerian pekerjaan umum direktorat jenderal sumber daya air balai wilayah sungai sumatera II, snvt pelaksanaan jaringan pemanfaatan air sumatera II prov.sumut (Irigasi dan Rawa III)?

1.3 Batasan Masalah

⁵ Sugiyono, **Metodologi Penelitian Administrasi**, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hal 31

Agar penelitian ini dapat dibahas dengan tuntas serta terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada penilaian kinerja anggaran belanja dengan menggunakan Analisis Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja.

Penelitian ini akan meneliti objek penelitian kinerja belanja Irigasi dan Rawa III dalam kurun waktu lima (5) tahun, yaitu tahun 2014-2018. Data yang diambil yaitu Laporan Keadaan Kredit Anggaran Irigasi dan Rawa III.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran Pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumut (Irigasi dan Rawa III) selama periode 2014-2018.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini diuraikan secara umum latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menunjang penulisan penelitian dan sebagai dasar dalam penelitian untuk mengolah dan menganalisis data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Pemerintah

2.1.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Ulum(2009)**Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai pencapaian, prestasi atau unjuk kerja dari instansi pemerintah.**⁶Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya tidak bagus. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan bagian dari bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan dan rencana yang telah dibuat bagi suatu instansi agar kinerja tersebut dapat dikategorikan sangat bagus sesuai dengan standar yang harus dicapai oleh setiap bawahan maupun atasan.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2011)**Pengukuran Kinerja adalah instrument yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.**⁷Pengukuran kinerja bukan tujuan akhir, tetapi merupakan alat agar menghasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberikan info apa yang terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasi strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut.

Menurut Ulum (2009)**Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.**⁸Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan

⁶Ihyaal Ulum M.D, **Audit Sektor Publik Suatu Pengantar**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal 56

⁷ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti,**Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit; Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 158

⁸Ihyaal Ulum M.D, **Op. Cit.**,hal 20

sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system.

2.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja Sektor Publik

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2011) mengemukakan tentang tujuan penilaian kinerja sektor publik yaitu :

a. Mengetahui tingkat ketercapaian organisasi

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment)

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward (misalnya: pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran).

e. Memotivasi pegawai

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward.

f. Menciptakan akuntabilitas publik⁹

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajemen dicapai dan seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja multlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Menurut Mardiasmo (2016) berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik:

- 1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.**
- 2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.**
- 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.**
- 4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.**
- 5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.**
- 6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.**
- 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah**
- 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.**
- 9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.**
- 10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.¹⁰**

⁹Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit; Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 158

2.2 Kinerja Belanja

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai prestasi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 **Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.**¹¹

Dalam PSAP Nomor 02 paragraf 31 dijelaskan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Paragraf 32 menjelaskan bahwa pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran, yaitu pengakuan belanja yang terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Selama ini tolok ukur untuk melihat kinerja belanja negara lebih didasarkan pada pendekatan tingkat penyerapan belanja. Semakin besar tingkat penyerapan, dianggap semakin optimal kinerja belanjanya dan sebaliknya, semakin rendah tingkat penyerapan semakin rendah pula kinerja belanja suatu K/L. Namun demikian, pengukuran efektivitas belanja yang hanya disandarkan pada tingkat penyerapan, menurut hemat kami kuranglah tepat.

Berdasarkan Model Pengukuran Kinerja Belanja Infrastruktur Kementerian/Lembaga ada beberapa kelemahan pengukuran kinerja belanja negara dengan pendekatan tingkat penyerapan antara lain :

¹⁰Mardiasmo, **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Edisi Pertama, Cetakan keenam, Penerbit: BPFE-YOGYAKARTA, 2016, hal 33

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Penerbit: Salemba Empat, 2012, Lampiran II.03 PSAP 02-3

- a) Hanya mampu mengevaluasi tahap pelaksanaan, dimana penyerapan hanya diukur dari jumlah dana yang berhasil terserap dari alokasi yang direncanakan selama pelaksanaan anggaran (tingkat kesesuaian terhadap alokasi yang direncanakan), sehingga hasilnya kurang optimal;
- b) Hanya mampu mengukur kinerja dari sisi penyerapan keuangan saja, namun belum memberi informasi pencapaian/realisasi secara fisik. Padahal indikator terwujudnya efektivitas belanja negara tidak hanya ditunjukkan oleh penyerapan keuangan yang optimal sesuai kebutuhan, tetapi juga menghasilkan output/outcome yang berkualitas sesuai target yang ditetapkan;
- c) Hasil pengukuran dengan pendekatan penyerapan belum mampu mewakili indikator efektivitas belanja secara komprehensif, sehingga perlu disempurnakan.¹²

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2.3.1 Pengertian APBN

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat**.¹³ APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kelompok anggaran pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang dapat dibebankan pada APBN. Menurut Erlina, dkk, (2012) **Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja**.¹⁴

- a. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah.

¹²MODEL PENGUKURAN KINERJA BELANJA INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN/LEMBAGA, <https://www.academia.edu/upgrade?ct=2205&feature=search&q=model+pengukuran+kinerja+belanja++infrastruktur&trigger=large-banner-tall>

¹³ Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi., **Akuntansi Pemerintahan**, Penerbit; In Media, Jakarta, 2016, hal 130.

¹⁴ Erlina, dkk., **Pengelolaan Dan Akuntansi Keuangan Daerah**, USU Press, Medan, 2012, hal 27.

- b. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan terdiri dari:
 - a) Pelayanan umum
 - b) Ketertiban dan keamanan
 - c) Pertahanan
 - d) Ekonomi
 - e) Lingkungan hidup
 - f) Perumahan dan fasilitas umum
 - g) Kesehatan
 - h) Pariwisata dan budaya
 - i) Agama
 - j) Pendidikan, serta
 - k) Perlindungan sosial
- c. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan rencana kerja masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
- d. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa
 - c) Belanja modal
 - d) Bunga
 - e) Subsidi
 - f) Hibah
 - g) Bantuan sosial
 - h) Belanja lainnya

2.3.2 Fungsi APBN

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016) fungsi APBN yaitu :

- a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN dapat menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Negara.¹⁵

2.3.3 Struktur APBN

2.3.3.1 Pendapatan Negara dan Hibah

- a. Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - a) Penerimaan Perpajakan, terdiri atas:
 - Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak Lainnya.
 - Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.
 - b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:
 - Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)
 - Bagian Laba BUMN

¹⁵Loc. Cit, hal 134

- PNB lainnya

b. Hibah

Hibah mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri.

2.3.3.2 Belanja

Belanja negara yang terdiri atas dua jenis yaitu:

- a. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan dipusat maupun didaerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana). dan Belanja Lainnya.
- b. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang di alokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) diindonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

d) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.

c. Pembiayaan meliputi:

a) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara, serta penyertaan modal negara.

b) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

- Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek.
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran

2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Faud (2016) "**Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya**".¹⁶Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

¹⁶Ramli Faud, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Cetakan Pertama: Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hal 19

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.4.2 Unsur – Unsur Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Erlina, dkk, (2017) **Laporan realisasi anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷**

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.4.3 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

¹⁷Erlina, dkk. **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Cetakan Ketiga; Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal 23

Menurut Faud (2016) **Manfaat informasi realisasi anggaran mencakup hal-hal sebagai berikut:**¹⁸

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

2.5 Analisis Belanja

Analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBN secara ekonomis, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya system penganggaran berbasis kinerja, semangat

¹⁸Ramli Faud, **Op.Cit.**, hal 20

untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tetapan dalam jiwa setiap pegawai pemerintah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output dan outcome dari anggaran.

Menurut Mahmudi (2015) mengemukakan **Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa:**¹⁹

1. Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang di anggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai (favourable varians) dan 2) selisih tidak disukai (unfavourable varians). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut favourable, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka di kategorikan unfavourable varians.

¹⁹Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi ke Tiga; UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015, hal 154

Selisih realisasi belanja dengan yang di anggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena sudah di amanatkan dalam anggaran.

Perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dapat dihitung dengan menggunakan analisis varians belanja yaitu sebagai berikut:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Sumber : Mahmudi, 2015

Berdasarkan selisih baik (favourable) atau kurang baik realisasi dengan anggaran belanja maka penilaian kinerja dari analisis varians belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik (favourable)	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik (unfavourable)	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber : Mahmudi, 2015

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma, pemerintah harus dapat mengendalikan belanja, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa

besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertumbuhan belanja harus di ikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal. Jika dilihat dari prespektif pertumbuhan belanja, sistem anggaran berbasis kinerja berbeda dengan anggaran tradisional. Sistem anggaran tradisional memiliki karakteristik yaitu pos-pos anggarannya tetap (line-item) dan selalu meningkat setiap tahunnya (incrementalism), sehingga kecenderungannya setiap tahun akan terjadi kenaikan anggaran meskipun sebenarnya kenaikan tersebut tidak priorotas atau bahkan tidak diperlukan. Namun dengan digunakannya anggaran berbasis kinerja yang mana setiap anggaran harus dikaitkan dengan target kinerja, maka kecenderungan untuk terus meningkatkan anggaran tidak perlu lagi terjadi. Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bahkan bisa dihilangkan atau dipangkas dan di alihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsip pertumbuhan belanja harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal terjaga.

Analisis pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2015

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi, 2015

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

- Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja

Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja. Rasio belanja per Fungsi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber : Mahmudi, 2015

- Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (recurrent). Pada umumnya proporsi belanja operasi

mendominasi total belanja, yaitu antara 60-90 persen. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber : Mahmudi, 2015

- Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja yang di alokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanda adalah antara 5-20 persen. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber : Mahmudi, 2015

- Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), dikendalikan melalui manajemen aktifitas, dan penetapan standar belanja dan standar harga unit, sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, dikendalikan melalui penetapan

anggaran ketat dan efisiensi anggaran. Rasio belanja langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber : Mahmudi, 2015

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah relative lebih efisien disbanding tahun lalu. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran belanja.

Perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2015

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja belanja dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi	Efisiensi Belanja (%)
Efisiensi	Kurang dari 100
Tidak Efisien	Lebih dari 100

Sumber : Mahmudi, 2015

5. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktifitas dan efektifitas belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

Sumber : Mahmudi, 2015

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai hal-hal seputar analisis kinerja belanja sebagai berikut:

Tabel 2.4
Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Marchelino	ANALISIS	Analisis yang	Hasil penelitian

Daling (2013)	KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	digunakan: analisis varians pendapatan, analisis rasio derajat desentralisasi, analisis rasio efektivitas pajak daerah, analisis varians anggaran belanja, analisis keserasian belanja, analisis rasio efisiensi belanja	menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terrealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi daryang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus. Meningkatkan PAD merupakan hal yang harus dilakukan untuk peningkatan pendapatan disertai penghematan belanja.
Anastasia Friska Palilingan (2015)	ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN	Analisis yang digunakan: analisis pertumbuhan belanja, rasio belanja rutin dan belanja pembangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja pada Dinas Pendapatan Kota Manado dapat

	(LRA) PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO	terhadap total belanja, rasio belanja operasi terhadap APBD dan rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio belanja langsung dan tidak langsung.	dikatakan baik, pertumbuhan bwlanja cenderung fluktuatif dan mengalami pertumbuhan positif.
Harry Al Makka (2015)	ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.	Analisis yang digunakan: analisis belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja pada Dinas PPKD Kota Kotamobagu dinilai sudah baik.

Sumber : Jurnal, Marchelino Daling 2013, Anastasia Friska Palilingan 2015, Harry Al Makka 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini dilakukan di Dirjen PUPR Irigasi dan Rawa III yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja No.292 Padang Sidempuan.Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja yang terdapat pada Dirjen PUPR Irigasi dan Rawa III periode 2014 – 2018.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Jenis data penelitian terdiri dari :

- a) Data Kualitatif, yaitu data-data yang non angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait dengan penelitian, seperti sejarah kantor Irigasi dan Rawa III, struktur organisasi dan pembagian tugas.
- b) Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka, yaitu berupa Laporan Belanja Irigasi dan Rawa III pada tahun 2014-2018.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Belanja Irigasi dan Rawa III untuk tahun 2014-2018.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Ada pun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat atau menyalin dokumen-dokumen maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis dan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti gambaran umum Ditjen PUPR serta Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2018

2. Metode Kepustakaan

Metode ini digunakan berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan, jurnal akuntansi dan skripsi.

3.4 Metode Analisis Data

Penganalisisan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang disesuaikan dengan keadaan dan bentuk data yang ada. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode analisis dengan cara mengumpulkan, menguraikan, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh yaitu laporan belanja Ditjen Irigasi & Rawa III tahun 2014 – 2018, sehingga memberikan keterangan jelas dan akhirnya menarik kesimpulan umum mengenai masalah yang dihadapi.

Dengan metode analisis belanja. Dimana analisis yang digunakan antara lain:

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Sumber: Mahmudi, 2015

Adapun kriteria yang digunakan dalam analisis varians belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik (favourable)	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik (unfavourable)	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber : Mahmudi, 2015

2. Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Analisis pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2015

Adapun kriteria yang digunakan dalam analisis pertumbuhan belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi, 2015

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2015

Adapun kriteria yang digunakan dalam rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi	Efisiensi Belanja (%)
Efisiensi	Kurang dari 100
Tidak Efisien	Lebih dari 100

Sumber : Mahmudi, 2015